



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jl. Letjen Ibrahim Adjie Kel. Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Bogor Kode Pos 16117

Telp./Fax. (0251) 8323976 Website : www.distanhut.bogorkab.go.id

Email : distanhut@bogorkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Daftar Terlampir
Dari : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor
Nomor : 000.1.5/1841.Sekret
Tanggal : 19 September 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Rapat Dinas

Sehubungan pelaksanaan anggaran kegiatan sudah memasuki akhir triwulan III, maka akan dilaksanakan Rapat Dinas pada :

Hari / Tanggal : Senin / 22 September 2025

Waktu : Pukul 08.00 s.d selesai
(sebelumnya mengikuti Apel Pagi)

Tempat : Aula Rapat Dinas (Aula Utama)

Acara : 1. Evaluasi Realisasi Anggaran/Fisik Kegiatan T.A 2025
(menyiapkan data pengadaan barang/jasa yang belum dilaksanakan/belum dicairkan)
2. Evaluasi Kinerja Triwulan III dan Finalisasi Perubahan Anggaran Reguler T.A 2025

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.



KEPALA DINAS,

ENTIS SUTISNA, SPd, MM
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196710041992121001

Lampiran Nota Dinas

Nomor : 000.1.5/1841.Sekret

Tanggal : 19 September 2025

Perihal : Undangan Rapat Dinas

Daftar Undangan :

1. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
2. Seluruh Kepala Bidang ;
3. Kasubag. Keuangan, Kasubag. Umpeg dan seluruh Ketua Tim ;
4. Seluruh Kepala UPT dan Kasubag. TU UPT ;
5. Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pengurus Barang



KEPALA DINAS,

ENTIS SUTISNA, SPd, MM
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196710041992121001



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jl. Letjen Ibrahim Adire Kel. Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Bogor Kode Pos 16117

Telp. Fax. (0251) 8323976 Website : www.distanhut.bogorkab.go.id

Email : distant@bogorkab.go.id

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RAPAT

Kepada Yth. : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Bogor

Tanggal : 5 Juni 2025

Perihal : Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan
T.A 2025

A. Dasar Pelaksanaan

Nota Dinas Undangan Kepala Dinas Nomor 000.1.5/1271.Sekret perihal Undangan Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan T.A 2025.

B. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tgl : Kamis/5 Juni 2025

Waktu : Pukul 08.00 s.d selesai

Tempat : Aula Rapat Dinas (Asrama)

C. Peserta Rapat

1. Plt. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2. Seluruh Kepala Bidang Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3. Kasubag Keuangan, Kasubag Umpeg dan seluruh Ketua Tim
4. Seluruh Kepala UPT dan Kasubag TU UPT
5. Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pengurus Barang

D. Hasil

Rapat dipimpin oleh Plt. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Materi Rapat terdiri atas :

- a. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Mei 2025 (dapat dilihat di Tabel) Realisasi anggaran dinas sampai dengan 31 Mei 2025 baru mencapai 26,68 persen terhadap pagu anggaran, atau 49,05 persen terhadap anggaran kas sampai dengan bulan Mei 2025. Capaian ini masih rendah, sehingga harus dilakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggarannya oleh para PPTK.

REALISASI ANGGARAN S/D 31 MEI 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
01 Januari sd 31 Mei 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Angkas sd Bulan Mei 2025	Realisasi		Sisa Anggaran	
				(Rp)	% md Anggaran		% md Angkas
1	2	3		4	5	6	
5	BELANJA DAERAH	91.479.188.457		24.404.000.443	26,68	67.075.188.014	
5.1	BELANJA OPERASI	80.377.843.448		23.368.565.803	29,07	57.009.277.645	
5.1.01	Belanja Pegawai	35.620.944.232		12.724.259.876	35,72	22.896.684.356	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.756.899.216		10.644.305.927	23,76	34.112.593.289	
5.2	BELANJA MODAL	11.101.345.009		1.035.434.640	9,33	10.065.910.369	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.235.063.879		1.035.434.640	19,61	4.199.629.239	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.866.281.130			-	4.866.281.130	
	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	91.479.188.457	49.759.613.029	24.404.000.443	26,68	49,05	67.075.188.014
	SEKRETARIAT	50.427.159.742	30.619.949.615	16.468.190.876	30,65	50,49	34.968.968.166
	BIDANG SARANA PERTANIAN	10.453.076.932	8.576.018.268	2.947.910.667	15,96	34,35	16.876.166.265
	BIDANG PRASARANA PERTANIAN	6.593.048.696	2.739.279.728	1.884.822.435	28,59	68,81	4.708.216.261
	BIDANG PUPUK	1.366.185.697	288.480.097	168.342.843	12,46	58,56	1.087.742.854
	BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN	7.020.474.366	3.096.938.163	1.594.762.401	22,72	51,50	4.425.711.965
	UPT Pertanian Wilayah I	689.454.876	297.513.283	170.761.044	24,77	57,38	518.733.832
	UPT Pertanian Wilayah II	634.924.417	506.167.191	196.221.946	28,65	36,60	488.692.471
	UPT Pertanian Wilayah III	875.372.440	697.169.939	409.701.946	58,18	74,07	365.670.594
	UPT Pertanian Wilayah IV	468.604.592	252.227.466	111.112.210	24,13	42,37	349.492.482
	UPT Pertanian Wilayah V	718.916.615	342.338.164	141.461.790	19,68	41,32	577.464.825
	UPT Pertanian Wilayah VI	477.207.732	189.662.724	116.136.991	24,34	61,23	361.070.741
	UPT Pertanian Wilayah VII	267.092.113	102.667.364	61.227.039	31,25	79,46	179.595.074
	UPT Pertanian Wilayah VIII	826.621.927	349.306.620	200.615.535	30,32	71,75	576.006.392
	UPT Pertanian Wilayah IX	634.226.613	520.506.629	96.149.790	15,00	18,28	639.076.823
	UPT Pertanian Wilayah X	415.335.476	228.668.741	86.178.978	21,23	38,58	327.156.508
	UPT Pertanian Wilayah XI	1.146.840.000	615.069.604	421.937.790	36,79	68,60	724.902.210
	UPT Pertanian Wilayah XII	438.709.261	302.461.092	168.902.466	38,50	55,84	269.806.895

Dari penjelasan PPTK dengan capaian realisasi yang masih rendah, sebagian besarnya sudah sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa, tetapi belum dilakukan pencairan anggarannya. Pada UPT Pertanian Wilayah II Tenjo, dilakukan pergeseran anggaran kas di perubahan reguler karena menyesuaikan dengan kondisi cuaca, sehingga sampai dengan bulan Mei kegiatan Pembangunan lantai Jemur belum dapat dilaksanakan.

b. Secara umum kendala dan masalah yang dihadapi dalam penyerapan anggaran antara lain :

- Adanya aplikasi baru dalam pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan pengadaan barang dan jasa, diantaranya : aplikasi coretax (terkait perpajakan), e-catalog versi 6 (dalam pengadaan barang dan jasa), sehingga dibutuhkan waktu untuk mempelajari dan penyesuaian dalam pelaksanaannya.
- Proses pembayaran pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui E-Catalog versi 6 baru dapat dilakukan di pertengahan bulan April 2025 (*trial by error*).
- Realisasi anggaran belum sesuai dengan jadwal anggaran kas (dapat dilihat pada tabel realisasi).
- Adanya maintenance aplikasi dan error/lemot pada aplikasi.
- Saat adanya pergeseran anggaran, terdapat jeda waktu untuk tidak/belum dapat mengajukan SPP/SPM terlebih dulu.
- Adanya kegiatan/program prioritas yang harus didahulukan, sehingga harus menunda kegiatan yang sudah terjadwal (terjadi di bulan Pebruari-Maret).

c. Penanganan kendala dan masalah dalam penyerapan anggaran:

- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait (dengan BPKAD, KPP Cibinong).
- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pejabat Pengada (PP) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa-Setda dan operator PPK.
- Memperhatikan anggaran kas, dalam pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggarannya.
- Mempertimbangkan pelaksanaan konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa.

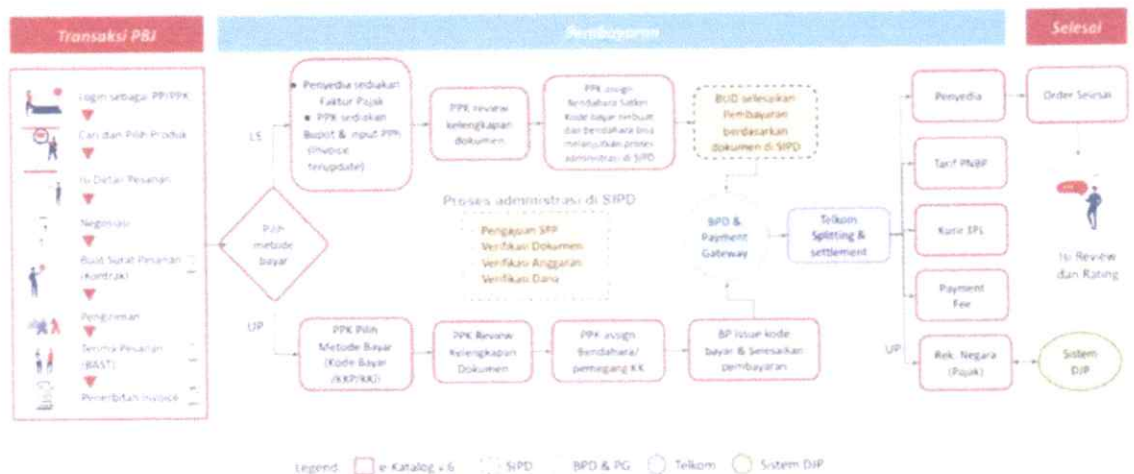
d. Konsolidasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 Pasal 1 ayat 51 "Konsolidasi Pengadaan adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

- Konsolidasi pengadaan dilakukan pada tahap : perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia
- Manfaat Konsolidasi PBJ diantaranya biaya pengadaan dan biaya transaksi menjadi turun, mengurangi beban kerja untuk paket berulang, dan waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat pada saat pemilihan penyedia
- Strategi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan berdasarkan komoditas barang/jasa sejenis, berdasarkan kebutuhan rutin/tidak rutin, berdasarkan lokasi kebutuhan, berdasarkan kepentingan pengembangan usaha kecil.

e. Proses Pengadaan dan Pembayaran pada E-Catalog Versi 6

Proses Bisnis Pembayaran di PEMDA



Notes

- Metode UP (PMK 58) Invoice V6 dipersamakan dengan Faktur Pajak melalui integrasi dengan sistem DJP. Nilai Kontrak dibayarkan adalah gross (termasuk Pajak).
- Metode LS (PMK 59) Penyedia menerbitkan dan upload faktur pajak. PPK upload bukti potong pajak dan input nilai PPN. Nilai kontrak dibayarkan adalah nett (exclude PPN).
- UP-PPK assign Bendahara Satker. LS-PPK assign personal BUID.
- Pembuatan dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D) tetap dilakukan sebagaimana proses PD masing-masing dan tetap menjadi dasar penyelesaian pembayaran.

- Proses pembayaran pada pengadaan di E-Catalog Versi 6 terdiri dari Metode Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Metode Pembayaran Langsung (LS).
- Metode Pembayaran Uang Persediaan (UP) : Peraturan pajak yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan dilakukan oleh

Platform. Bendahara pengeluaran tidak perlu melakukan pemungutan, penyetoran, ataupun pelaporan pajak. Invoice yang dikeluarkan oleh platform sudah dipersamakan dengan Faktur Pajak.

- Metode Pembayaran Langsung (LS) : Peraturan pajak yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan dilakukan oleh Instansi Pemerintah/Satker. Penyedia perlu melakukan upload Faktur Pajak dan Bukti Potong atas PPh.
- Penyedia akan dikenakan potongan biaya transaksi mencakup biaya payment gateway dan biaya bank, berdasarkan nominal yang telah disepakati antara tim Katalog dan Mitra Payment Gateway.

f. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi capaian kinerja sampai dengan TW II 2025, diawali dengan penjelasan umum dan dilanjutkan dengan desk pengisian tabel capaian kinerja dan penandatanganan berita acaranya oleh Tim Program dan Laporan (Proglap).

Demikian disampaikan laporan hasil rapat evaluasi ini, sebagai bahan lebih lanjut.

Kasubag. Keuangan,



Indri Wulandari, SP

NIP. 197412271999032007

Mengetahui,

Plt. Sekretaris Dinas



Ruhendra, SP, MM

NIP. 196805201991031006

1. Kepala Bidang Prasarana Pertanian

2. Kepala Bidang PPUP

3. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian

4. Kepala Bidang Sarana Pertanian



Ruhendra, SP, MM

NIP. 196805201991031006



Indriyati, S.Hut

NIP. 197206291998032002

Judi Rachmat S, S.Hut, MM

NIP. 197007111993021001



R. Suhartono, SP

NIP. 197004272002121002

DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DISTANHORBUN



